



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : GUNAWAN
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 204186

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 530.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2.400 m2/2.400 m2 di KAB / KOTA SERDANG BEDAGAI, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 144.300.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA MOBILIO MVP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
4. LAINNYA, THRAIL SEPEDA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.100.000

**D. SURAT BERTAGIH** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 91.509.629

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 770.909.629



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

770.909.629

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.